

PENERAPAN ETIKA JURNALISTIK MENGENAI PEMBERITAAN ISU PENTING DI MEDIA MASSA

Amelia Rahmi

(Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang)

ABSTRACT

The main purpose of this research is to find out urgent issues in Suara Merdeka newspaper and Rasika Radio. And then to explain how Journalism Ethic Code applied to break the news in Suara Merdeka newspaper, also how broadcasting Behavior Regulation and Broadcasting Program Standard (P3SPS) applied to Rasika Radio.

The data were collected from headline Suara Merdeka newspaper during 2006, and record Suara Hati Rakyat talkshow program during 2006, and then used content analysis to get some information about urgent issues.

The result of data analysis indicate that: First, urgent issues in Suara Merdeka newspaper about Law Topic (38 %), politic (21 %), economic (13 %), and education, religion, social (each other 4 %). Second, urgent issues in Rasika Radio about religion (46 %), social culture (26 %), and law, education, communication, health (each other 7 %). Third, generally Suara Merdeka newspaper applied Journalism Ethic Code. Only a few fail to appreciate privacy principle, balance and justice principle and objectivity principle. Fourth, generally Rasika Radio applied P3SPS specially about factual program. Only a few fail, that is not enough time host and source dialog before start program, and no clear identify man who interaction.

Kata Kunci : Etika Jurnalistik, Isu Penting.

A. PENDAHULUAN

Media massa di Indonesia memulai babak baru pada masa menjelang kejatuhan rezim Suharto, dan waktu-waktu setelahnya. Bisa dikatakan bahwa ketika itulah sesungguhnya kita telah dapat

pers yang kelewat batas. Kendali itu adalah moral wartawan, Kode Etik Jurnalistik, aturan hukum serta tata nilai dalam masyarakat.

Dalam realitasnya, dunia jurnalistik di Negara kita telah memiliki banyak peraturan yang berfungsi untuk menjadi pedoman atau rambu-rambu agar perkembangan media massa sesuai dan selaras dengan budaya bangsa dan kemajuan bangsa. Telah banyak produk hukum dilahirkan untuk itu, seperti Undang Undang tentang Pokok Pokok Pers (UU No. 40 tahun 1999). Meski demikian produk hukum tersebut dirasa belum cukup untuk membentengi pribadi wartawan agar bersikap dan berperilaku profesional, yakni menjunjung tinggi prinsip-prinsip jurnalistik dan mengutamakan kepentingan masyarakat luas, bukan kepentingan pribadi maupun kelompok. Untuk itu maka disusunlah Kode Etik Jurnalistik (KEJ), yang selanjutnya lebih difungsikan sebagai "polisinya" wartawan itu sendiri. Menurut hemat kami, ketaatan wartawan pada KEJ akan menjadi titik awal bagi pentaatan pada Undang Undang Pers, hal ini disebabkan sifat dari etika itu sendiri yang "tidak memaksa"

Demikian pula untuk media massa elektronik seperti radio. Walaupun telah ada Undang Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran, masih tetap diperlukan alat pendukung yang lain sebagai pengawasan atas penyelenggaraan siaran yang sesuai dengan UU yang berlaku. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia amatlah dibutuhkan.

Bagaimanapun juga kita telah memasuki era reformasi kehidupan jurnalistik di Indonesia. Bahkan sebenarnya kemerdekaan mengeluarkan pendapat sudah sejak lama (semenjak UUD 1945 disahkan sebagai dasar negara Indonesia) diakui secara legal formal, oleh karenanya kebebasan pers merupakan hak yang melekat bagi seluruh insane pers yang tak dapat dirampas dan dibatasi dengan seenaknya. Tanpa kebebasan mustahil wartawan mampu melaksanakan tugas jurnalistiknya, oleh karenanya meski telah ada UU yang berlaku masih dibutuhkan norma etika agar para wartawan dapat memperoleh hak-haknya dengan mengacu pada kewajiban profesional yang didasarkan pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, sebagaimana tercermin dalam KEJ untuk media cetak dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) untuk media radio.

Penelitian terhadap pemberitaan media massa sangat perlu dilakukan. Hal ini mengingat manusia modern sekarang menjadikan

Setidaknya, secara praktis dari penelitian ini alternative bagi pengelola Suara Merdeka dan Radio Rasika dalam upaya mendidik masyarakat dengan informasi-informasi aktualnya secara santun dan bertanggung jawab. Selain itu dalam tataran teoritis, riset ini diharapkan memberi kontribusi bagi pengembangan Ilmu Komunikasi, khususnya komunikasi massa.

E. KAJIAN PUSTAKA

Banyak kasus yang berkaitan dengan kehidupan media massa di Indonesia telah terjadi dan dirasakan/dinilai sangat merugikan masyarakat. Salah satu yang kontroversial barangkali heboh goyang ngebor Inul Daratista, yang terjadi di tahun 2003. Kasus tersebut tidak hanya mengundang keprohitan masyarakat luas, namun sekaligus juga menyadarkan pada para moral gate keepers seperti: orang tua, guru dan ulama akan perlunya sebuah standar norma penyiaran. Masduki menyatakan bahwa kasus Inul selain mengundang keprihatinan juga merupakan refleksi kritis atas fenomena social dalam kehidupan bermedia di Indonesia ³.

Kemarahan massa terhadap aksi Inul ditemukan di banyak tempat/daerah, namun disisi lain banyak pula yang malah bersimpati. Inilah yang barangkali kontroversial.

Media massa nampaknya ditakdirkan bersifat paradox. Disatu sisi fungsi media sebagai penyelaras tata kehidupan social (seperti values, norm, social order), namun pada sisi lain juga berfungsi sebagai alat hiburan/entertainment. Padahal, sebagai media entertainment cenderung kuat akan dikendalikan pasar. Sementara salah satu karakteristik pasar adalah tidak mengenal nilai, tergantung permintaan dan penawaran (supply and demand) semata, karena menurut "logika" televisi, masyarakat itu cenderung lebih tertarik pada objek yang bersifat kontradiktif. (lihat Redi Panuju .Paradoks Tayangan Televisi ⁴.

E.1 Kode Etik Jurnalistik

Istilah jurnalistik berasal dari journalism (Inggris), yang bermakna suatu seni kejuruan yang bersangkutan dengan pemberitaan dan persuratan ⁵. Jurnalistik merupakan suatu profesi yang memiliki tanggung jawab yang sangat besar, karena

³ Masduki, *Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik*, 2003. hal. 118

⁴ Jawa Pos , edisi 23-9-2005

⁵ Da'far Assegaf, 1982, hal 119

Jurnalistik memiliki padanan kata kewartawanan, yaitu kegiatan yang berhubungan dengan pengumpulan, pengolahan dan penyiaran berita dalam bentuk berita, pendapat, ulasan, gambar dan sebagainya dalam bidang komunikasi massa. Sedangkan wartawan adalah orang yang melakukan pekerjaan kewartawanan (UU Pokok Pers ps 1 ayat 3 dan 4).

Jurnalistik telah nyata manfaatnya, juga telah diakui secara formal sebagai suatu profesi, maka sangat dibutuhkan etika profesi. Kode Etik Jurnalistik merupakan produk etika yang menjadi pedoman bagi insan pers dalam bekerja. Selain itu jurnalistik perlu diatur secara jelas dan tegas dengan seperangkat aturan hukum (produk hukum), sehingga bisa menjadi payung hukum bagi kerja jurnalis (seperti UU tNo 40 tahun 1999 tentang Pers, UU No 32 tahun 2002 tentang Penyiaran)

Dalam sejarah per Indonesia, terdapat sejumlah kode etik yang dirumuskan dan diberlakukan oleh organisasi wartawan, seperti PWI, AJI dan gabungan wartawan cetak-elektronik. Kode etik yang paling tua dikenal dengan Kode Etik PWI, memuat 7 pasal. Berikutnya adalah Kode Etik yang sering disebut KEWI. Kode ini merupakan kesepakatan yang disusun oleh 26 organisasi wartawan di BANDUNG TAHUN 1999. Kelahiran KEWI didasari semangat untuk memajukan kehidupan media massa di era kebebasan informasi. Kode ini memuat IV BAB dengan 17 pasal, yaitu meliputi BAB I: Kepribadian dan Integritas, BAB II: Cara Pemberitaan, BAB III: Sumber berita, dan BAB IV: Kekuatan Kode Etik.

E.2 Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS)

Lembaga penyiaran dalam menyampaikan pesan-pesannya menggunakan frekwensi gelombang elektromagnetik, yang sesungguhnya ini milik public. Oleh karenanya pemanfaatan/penggunaan frekwensi tersebut harus dipertanggung jawabkan terhadap public. Sebagaimana ditegaskan oleh Lilik Budiastuti (2005), bahwa salah satu bentuk tanggung jawab itu adalah sejauh mana lembaga penyiaran dapat memberikan nilai-nilai positif yang dapat mencerahkan, dan sekaligus memberi inspirasi bagi masyarakat melalui sajian yang ditampilkan agar kualitas hidup lebih baik.

penilaian baik dan buruk tindakan manusia, dan etika menjadi perlu karena merupakan acuan bagaimana semestinya manusia berperilaku.

E.3 Media dan Konstruksi Realitas

Media massa yang oleh Marshal Mc Luhan disebut dengan *extension of man* benar-benar merupakan alat kepanjangan manusia untuk memahami perkembangan peristiwa yang terjadi disekitarnya. Kejadian disluruh pelosok dengan cepat diberitakan wartawan, tentunya terlebih dulu dilakukan penilaian dan pertimbangan efek yang mungkin muncul jika nantinya dipublikasikan. Selain itu juga mempertimbangkan *news value*, *magnitude*, *crime*, *approximity* dan sebagainya.

Berkaitan dengan hal itu maka ada beberapa pendapat mengenai nilai kebenaran yang diterapkan media. Benarkah sesuatu yang disampaikan media itu objektif dan tidak memihak? Pul Watson (seorang pendiri Greenpeace) berpendapat mengenai perilaku media massa. Menurutnya, konsep kebenaran yang dianut media bukanlah kebenaran sejati, namun sesuatu yang dianggap masyarakat sebagai suatu kebenaran.⁸

E.4 Konsep Agenda Setting

Agenda Setting merupakan salah satu teori komunikasi massa yang percaya akan keperkasaan media dalam mempengaruhi public. Teori yang dikemukakan oleh Mc Comb dan Donald Shaw (1968) ini memiliki asumsi dasar bahwa media mempunyai kemampuan mentransfer isu untuk mempengaruhi agenda public. Khalayak akan menganggap suatu isu itu penting karena media menganggap isu itu penting juga.

Adapun fungsi Agenda Setting sebagaimana dikatakan oleh Rogers dan Dearing merupakan fungsi linear yang meliputi tiga bagian. Pertama, agenda media itu sendiri harus disusun oleh aak media. Kedua, agenda media dalam beberapa hal mempengaruhi atau berinteraksi dengan agenda public, yang nantinya akan mempengaruhi agenda kebijakan. Ketiga, agenda kebijakan adalah apa yang dipikirkan para pembuat kebijakan (baik public maupun privat) yang dianggap penting oleh public.

Severin dan Tankard memerinci dimensi tiga agenda tersebut sebagai berikut:

⁸ Sebagaimana disebutkan oleh Tuchman bahwa pembuatan berita di media pada dasarnya tak lebih dari penyusunan realitas-realitas hingga membentuk sebuah cerita, yang kemudian diikuti oleh publik.

program acara talkshow Suara Hati Rakyat Semarang, yang disiarkan setiap hari Selasa sore pukul 15.00 sampai 16.00 WIB.

F.2 Pengumpulan data dan analisis

Pengumpulan data dengan dokumentasi. Sumber data utama adalah Suara Merdeka edisi tahun 2006 dan rekaman siaran Suara Hati Rakyat di Radio Rasika selama 2006. Untuk sampel diambil masing-masing dua issue penting dalam dua minggu setiap bulannya. Jadi jumlahnya 24 issue penting di Suara Merdeka. Untuk data berupa rekaman Suara Hati Rakyat Semarang hanya diperoleh sebanyak 15 edisi. Data inilah yang dapat dibaca untuk selanjutnya dianalisis.

Analisis diawali dengan mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode dan mengkategorikannya. Selanjutnya digunakan analisis isi untuk memahami materi berita yang berisi isu-isu penting dengan perspektif kualitatif, yang tujuannya untuk menjawab pertanyaan: Apakah Suara Merdeka dan Radio Rasika dalam memberitakan issue-isue penting selama 2006 menerapkan kode etik profesi?

G. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berikut data judul issue penting di Koran Suara Merdeka selama 2006:

No.	EDISI	JUDUL	TOPIK	PELANGGARAN
1	02-01-06	Bom Palu, Polisi Periksa 27 Saksi Korban Tewas 7 Orang	Hukum	-prinsip kesopanan & menghormati perasaan moral masyarakat
	12-01-06	Pemili Raya PKS Jateng Kader Senior Masih Mendominasi	Politik	-
	09-02-06	Mabes Polri Minta Maaf: Terkait Tim Investigasi Impor Beras DPR	Hukum	-Prinsip keseimbangan & keadilan
	16-02-06	Operasi Hutan Lestari Progo Sita 146 Batang Kayu Jati ilegal	Hukum	-Prinsip keseimbangan & keadilan -Prinsip

3	04-07-06	DPR Usut Temuan Senjata: AM Fatwa, Tak Lepas dari Motif Bisnis	keamanan	-Prinsip objektivitas dan akurasi data
4	27-07-06	Panti Marhaenis Status Quo: Buntut Penyerbuan Satgas PDI-p	politik	-
5	07-08-06	Ribuan Umat Kutuk Israel	agama	-
6	02-08-06	Sidang Perkara Teroris di Semarang	hukum	-Prinsip menghormati privacy(sub kategori: asas praduga tak bersalah)
7	02-09-06	Mien Rais Diminta Untuk Tidak Ikut Campur dalam Persoalan Internal PKB	politik	-prinsip keseimbangan dan keadilan
8	15-09-06	Kongres IV Bahasa Jawa Dinilai Elitis	Budaya	-prinsip objektivitas dan akurasi data
9	11-10-06	Presiden Instruksikan Polri Perbaiki Teknik Investigasi Kasus Munir	hukum	-prinsip koherensi
0	16-10-06	Ketua DPR Setuju Voucher Dihentikan	politik	-prinsip keseimbangan dan keadilan
1	06-11-06	Tersangka Masuk Peradilan Anak Kasus Penusukan Siswi SMK	hukum	-prinsip menghormati privacy(sub kategori: asas praduga tak bersalah)
2	14-11-06	Bulog jamin Siap Mengganti Raskin	ekonomi	-prinsip keseimbangan dan keadilan

pemberitaan sebaiknya dengan menggunakan kode inisial. Kedua, prinsip keseimbangan dan keadilan. Dalam hal ini Suara Merdeka seringkali memberitakan sesuatu secara tidak seimbang antara sumber-sumber berita, sehingga Suara Merdeka dalam pemberitaannya terkesan kurang netral. Ketiga, prinsip objektivitas Dan akurasi data. Dalam hal ini pemberitaan Suara Merdeka sering kali tidak didukung data akurat, terlebih beberapa diantaranya terjadi pencampuradukan antara opini dan fakta.

Selain temuan tersebut diatas, temuan yang bias disampaikan bahwa Suara Merdeka sangat menghormati prinsip nasionalisme dan prinsip kebebasan beragama, sehingga tidak ditemukan kasus-kasus pemberitaan yang dipandang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, maupun pemberitan yang menyinggung perasaan agama tertentu. Hal lainnya, Suara Merdeka juga sudah secara tepat memilih sumber berita yang dianggap memiliki kredibilitas dan kompetensi.

Adapun data program SUARA HATI RAKYAT SEMARANG, adalah sebagai berikut

No	Edisi	Tema	Nara sumber	Instansi
1	01-01-06	Antisipasi Keracunan Jajanan di Sekolah	Dr Nugroho, Drs Kaswadi	RS Tugurejo dan SD Purwoyoso i
2	24-01-06	Aliran Sempalan	Drs Sodli &HM Aminuddin Sanwar MM	Balitroh dan Dekan F Dakwah
3	31-01-06	Satu Suro dlm Ajaran Islam & Kebudayaan	Drs Ridin Sofyan MPd	Dekn F Ushuludin
4	13-06-06	Tabah Dalam Menghadapi Cobaan	Drs FachruroziM Ag	Dosen F Dakwah
5	27-06-06	UN dan Permasalahannya	Sodiq Abdullah M Ag	Dosen F Tarbiyah
6	07-07-06	KORPRI dan Pembangunan Jateng	Drs Mardjijono	Ketua DPP Korpri Jateng (sekda Jateng)
7	25-07-06	UU Kewarganegaraan	Beny L Setianto & Haryanto Halim	UNIKA Soegiyopranoto

terkadang tidak jelas identitasnya (hanya menyebut nomor telepon saja). Kemudian perlu diinformasikan pula bahwa dalam proses triangulasi data diperoleh pemahaman bahwa: 1) penentuan topik-topik actual sangat bagus (karena menggunakan acuan Agenda Setting). Apalagi dihadirkan pula nara sumber yang kompeten, hal inilah barangkali yang membuat respon pendengar sangat banyak, bahkan sampai ada 12 respon (sms dan telepon) dalam satu kali siaran. 2) Siaran yang merupakan kerjasama ini dilakukan di dua tempat terpisah, host di Rdio Rasika dan nara sumber di RadioMBS Laboratorium Dakwah (LABDA) Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang. Oleh karenanya kesempatan ramah tamah dan diskusi host dengan nara sumber seputar tema sangat sempit.

H. SIMPULAN

1. Isue penting yang diberitakan di Koran Suara Merdeka yang terbanyak mengenai topik hukum (38%), kemudian politik (21%), social (15%), ekonomi (13%), dan untuk topik: agama, social, pendidikan, kesehatan, criminal, keamanan dan budaya (masing-masing senilai 4%).
2. Isue penting yang diberitakan di Suara Hati Rakyat (Radio Rasika) terbanyak mengenai topik agama (46%), social budaya (26%), dan untuk topik hukum, pendidikan, komunikasi dan kesehatan (masing-masing senilai 7%).
3. Umumnya Suara Merdeka telah menerapkan KEJ dalam memberitakan issue penting selama 2006. Terutama dalam menghormati prinsip nasionalisme dan prinsip kebebasan beragama. Memilih sumber berita yang kredibel dan kompeten. Pelanggaran yang ditemukan berfokus pada prinsip menghormati privacy, prinsip keseimbangan dan keadilan, serta prinsip objektivitas.
4. Pada umumnya Radio Rasika telah menerapkan P3SPS dalam memberitakan issue penting selama 2006, khususnya mengenai program factual. Rasika telah menyepakati ketentuan dalam kerjasama, dan selalu menjelaskan bahwa program terselenggara atas kerjasama dengan Fakultas Dakwah IAIN Walisongo. Menghadirkan nara sumber yang kredibel dan kompeten dibidangnya, dan dapat menumbuhkan demokratisasi di masyarakat karena selalu mengajak partisipasi audien. Pelanggaran yang ditemukan hanya terletak pada tidak cukupnya waktu berdialog dengan host (sebab mereka tidak di tempat yang sama) sebelum dimulai acara. Selain itu juga sifat acara yang interaktif sehingga garis besar pertanyaan belum disampaikan,

- Hakim**, Ida Masruroh, *Mendambakan Siaran Tanpa Kekerasan dan Pornografi*. Makalah dalam Public Gathering di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Tengah, 9 September 2005
- Hamad**, Ibnu, *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa* (Jakarta: Granit, 2004).
- Hornby**, AS., *Oxford Advance Learner's Dictionary of Current English*. (Oxford University Press, 1985).
- Jawa Pos**, Rubrik : *Paradoks Tayangan Televisi*, edisi 23 September 2005.
- Kasiyanto**, *Informasi realitas sebagai Bentuk Reformasi Pemberitaan Media Massa: Sebuah Apresiasi Masyarakat Desa*. Laporan hasil riset dalam Jurnal Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia Vol. IV/ Oktober 1999
- Komunikasi Penyiaran Indonesia Daerah**. Keputusan Komisi penyiaran Indonesia Nomor 009/SK/2004 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran
- Kriyantono**, Rachmat, *Teknik Praktis Riset Komunikasi: disertai contoh praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi , Komunikasi Pemasaran*, (Jakarta: Kencana, 2006).
- Kusimaningrat**, Himat, *Jurnalistik: Teori dan Praktek*, (Bandung: Remadja Rosda Karya, 2005).
- Masduki**, *Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik*, (Yogyakarta: UII Press, 2003).
- Moleong**, Lexy, J., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remadja Rosdakarya, 2001).
- Oetama**, Jacob, *Perspektif Pers Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1987).
- Profil Pers Indonesia: 59 tahun PWI Mengabdikan Negeri** (Bambang Sadono. Ed) Semarang: Citra Almamater. Tanpa tahun.
- Purwasito**, Andrik, *Komunikasi Multikultural*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, . 2003).
- Rahmi**, Amela, *Aspek Kekerasan di Media*. Makalah diskusi Dosen Komunikasi Penyiaran Islam Fak. Dakwah IAIN Walisongo, 7 juni 2005.
- Rachmadi**, F., *Perbandingan Sistem Pers: Analisis Deskriptif Sistem Pers di Berbagai Negara*, (Jakarta: Gramedia, 1990).